

PROBLEM, TANTANGAN PENGEMBANGAN, DAN DESAIN KEBIJAKAN BIDANG PETERNAKAN PULAU-PULAU KECIL – Kasus Provinsi Maluku

Adolf B Heatubun

Jurusan Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura,
Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Poka, Ambon. e-mail: *adolf_bas@yahoo.com*

ABSTRAK

Usaha peternakan di Provinsi Maluku perlu dikembangkan melalui konsep pengembangan kawasan agribisnis berbasis peternakan, dikelola secara berkelanjutan dan berakses ke industri peternakan hulu sampai hilir. Konsep tersebut mengarahkan usaha ternak pada kondisi berpeluang meningkatkan keuntungan dan daya saing. Pengembangan kawasan agribisnis peternakan menurut gugus pulau Provinsi Maluku adalah: Pulau Buru dan Seram sesuai untuk pengembangan ternak besar: sapi, kambing dan babi, serta ternak unggas seperti ayam buras, pedaging, petelur dan itik. Pulau Ambon dan Ibukota Kabupaten/Kota lainnya sesuai untuk pengembangan usaha ternak unggas: ayam buras, pedaging dan petelur, juga unit usaha penggemukan ternak besar. Kepulauan Tanimbar dan Pulau-pulau Terselatan sesuai untuk pengembangan ternak kambing, domba, sapi, serta ayam buras. Kebijakan yang mendukung percepatan pembangunan agribisnis peternakan tersebut adalah 1) Pembangunan infrastruktur transportasi memadai yaitu transportasi lokal darat dan laut antarwilayah gugus pulau, 2) Kebijakan kemudahan perijinan usaha dan bisnis UKM berbasis peternakan, 3) Kebijakan kredit dan permodalan pada UKM ternak dan hasil ternak, 4) Kebijakan pembentukan kelembagaan peternak secara formal, 5) Kebijakan kemitraan antara peternak dengan *stakeholder* lainnya, 6) Kebijakan penetapan pusat-pusat perdagangan dan pemasaran ternak bersifat lokal, antarwilayah dan antarregion, dan 7) Kebijakan peningkatan kualitas SDM peternak.

Kata kunci: kebijakan peternakan, pulau-pulau kecil, Maluku

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.580 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km. Luas laut sekitar 3,1 juta km² atau 62 % dari luas teritorialnya. Sebagian besar dari pulau-pulau tersebut (lebih dari 10.000 pulau) merupakan pulau-pulau berukuran kecil yang tersebar dari Sabang hingga ke Merauke (Budhiman 2005). Negara kepulauan ini kaya raya akan sumberdaya alam pesisir dan lautan, dan letak geografi pulau-pulau yang tersebar luas memiliki arti penting dari sisi politik, sosial, ekonomi, budaya dan pertahanan keamanan (Dutton 1998).

Sebagaimana pengembangan dan pengelolaan kawasan pesisir pada umumnya, pengelolaan dan pengembangan Pulau-pulau Kecil juga memerlukan arah kebijakan dan pembangunan yang tepat dan terencana secara baik. Diperlukan suatu rencana tata ruang Pulau-pulau Kecil yang akurat sehingga arah pengelolaan, pengembangan dan pengambilan kebijakan saling bersinergi mendukung tercapainya pembangunan daerah kepulauan yang maju. Hal ini sekaligus sangat

penting mencegah arah pengelolaan dan pengembangan yang merugikan, baik dari segi ekonomi maupun dari segi ekologis di kemudian hari.

Provinsi Maluku termasuk salah satu provinsi di Indonesia yang berciri khas pulau-pulau kecil. Pengembangan wilayah Kepulauan Maluku sebagai salah satu wilayah dengan gugusan pulau-pulau kecil tersebar dan berbatasan dengan negara tetangga, perlu dilakukan dengan kebijakan dan program yang terpadu dan tepat sesuai potensi yang dimiliki dan berbagai hambatan yang dihadapi. Tantangan terbesar adalah memberikan perhatian yang sama terhadap seluruh wilayah pulau, dan sekaligus membangun keterkaitan antarwilayah pulau dalam satu kesatuan tata ruang wilayah pulau dan laut. Posisi kepulauan yang tersebar seringkali menyebabkan program pembangunan yang dibuat hanya difokuskan pada satu pulau tertentu saja dengan alokasi program sektoral tertentu tanpa memperhatikan keterpaduan program dalam satu kesatuan tata ruang.

Wilayah Kepulauan Maluku menghadapi permasalahan sangat kompleks terutama sebagai akibat ketertinggalan dan keterisolasian. Permasalahan tersebut antara lain: 1) tingginya angka kemiskinan, 2) rendahnya derajat pendidikan dan kesehatan, 3) tingginya angka pengangguran, dan 4) terjadinya gangguan ketertiban dan keamanan sebagai akibat konflik sosial. Berbagai permasalahan tersebut disebabkan oleh: 1) rendahnya akses terhadap layanan jasa pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan terjangkau, 2) terbatasnya kegiatan ekonomi produktif yang menyerap angkatan kerja, 3) rendahnya investasi, 4) terbatasnya prasarana dasar seperti air minum dan sanitasi, jalan, pelabuhan, dan listrik, 5) terbatasnya akses terhadap layanan transportasi yang menghubungkan antar wilayah (Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas 2009a).

Selain itu, wilayah Kepulauan Maluku yang tersebar dan dipisahkan perairan menyebabkan program pembangunan cenderung hanya terpusat pada pulau yang menjadi pusat pemerintahan daerah dan kurang menyebar ke pulau-pulau lainnya. Wilayah yang tersebar juga menghambat mobilitas sumberdaya dan penduduk akibat minimnya jaringan transportasi. Kondisi ini juga menyebabkan rendahnya pengawasan dan pengendalian kondisi ketertiban dan keamanan wilayah, serta munculnya potensi konflik dan politik-keamanan (separatisme). Dengan kondisi wilayah yang tersebar dan berbagai hambatan, perencanaan pembangunan perlu memperhitungkan secara sungguh-sungguh karakteristik wilayah Kepulauan Maluku sebagai satu kesatuan wilayah yang saling berhubungan termasuk optimalisasi koordinasi dan sinergi berbagai kebijakan dan program pembangunan sektoral.

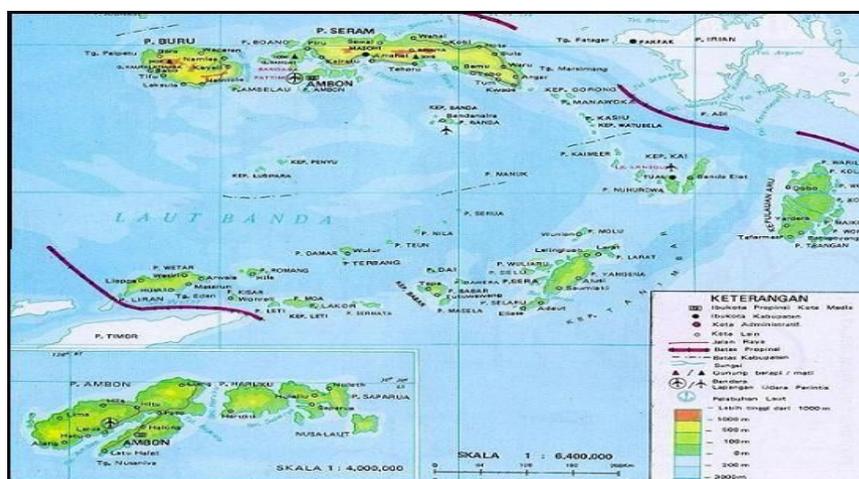
Kepulauan Maluku memiliki potensi pengembangan yang sangat besar berbasis sumberdaya alam terutama perikanan dan wisata bahari. Potensi sumberdaya perikanan laut sangat besar dan masih belum dikelola secara optimal. Potensi sumberdaya lahan, hutan, perkebunan dan peternakan juga cukup besar sehingga masih ada peluang pengelolaan sumber daya tersebut untuk pengembangan ekonomi wilayah. Pemanfaatan dan pengelolaan berbagai sumberdaya tetap harus mempertimbangkan keterpaduan dan keseimbangan dalam penataan ruang wilayah untuk mencegah eksploitasi yang berlebihan, dan

mendorong penyebaran dampak perekonomian ke seluruh wilayah (Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas 2009b).

Keadaan Geografi Provinsi Maluku

Luas wilayah Maluku secara keseluruhan adalah 712.479,69 km². Sebesar 92.4% dari luas ini adalah lautan yaitu 658.294,69 km² sedangkan daratannya hanya 7,6% atau seluas 54.185 km². Dengan demikian Maluku merupakan daerah kepulauan yang terdiri dari 632 pulau besar dan pulau kecil. Pulau terbesar adalah Pulau Seram (18.625 km²), disusul Pulau Buru (9.000 km²), Pulau Yamdena (5.085 km²) dan Pulau Wetar (3.624 km²) (Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Maluku 2010).

Sesuai dengan kondisi daerah yang dominan lautan, letak gugus pulau yang satu berjauhan dengan gugus pulau lainnya. Jarak yang berjauhan merupakan kendala dasar dalam pembangunan gugusan pulau di Kepulauan Maluku (Gambar 1).



Gambar 1. Peta Maluku

Dari sisi geografis, Provinsi Maluku dibatasi oleh Provinsi Maluku Utara di sebelah utara; Provinsi Papua Barat di sebelah timur; Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah di sebelah barat; serta dengan Negara Timor Leste dan Australia di sebelah selatan. Sesuai karakteristik Maluku sebagai wilayah kepulauan, dalam aspek penataan pembangunan, Maluku memiliki konsep gugus pulau, laut pulau dan pintu jamak (*multi gate*) dengan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan publik, pusat perdagangan serta lalu lintas arus barang dan jasa. Berdasarkan pendekatan geografis, kesamaan budaya, alam dan kecenderungan orientasi, kesamaan perekonomian dan potensi sumber daya alam, maka wilayah Kepulauan Maluku dapat dikelompokkan dalam enam gugus pulau masing-masing: 1) Gugus Pulau Buru, Seram, Ambon, Kepulauan Lease (Saparua, Haruku dan Nusalaut), Geser, Gorom, Monowako, Banda, Teon, Nila dan Serua; 2) Gugus Pulau Kepulauan Kei dan Kesui; 3) Gugus Pulau Kepulauan Aru; 4) Gugus Pulau Kepulauan Tanimbar (Pulau Yamdena), Larat, Waliaru, Selaru, Selu, Sera dan Molu; 5) Gugus Pulau Kepulauan Babar dan Pulau Sermata; dan 6) Gugus Pulau Damar, Romang, Leti, Moa, Lakor, Kisar dan Wetar.

POTENSI TERNAK, PRODUKSI DAN KONSUMSI HASIL TERNAK

Potensi Ternak

Potensi ternak di Provinsi Maluku dan perkembangannya beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 1 dan 2 di bawah ini (BPS Provinsi Maluku 2010).

Tabel 1. Produksi Telur di Provinsi Maluku, 2005-2009 (butir).

Kab/Kota	Jenis Telur			
	Ayam Buras	Ayam Petelur	Itik	
1. Maluku Tenggara Barat (MTB)	567.822	-	279.612	
2. Maluku Barat Daya (MBD)	-	-	-	
3. Maluku Tenggara	1.052.879	-	875.533	
4. Maluku Tengah	1.052.866	3.291.223	712.984	
5. B u r u	7.810.800	-	13.840.847	
6. Buru Selatan	2.681.229	-	600.371	
7. Kepulauan Aru	734.868	-	59.297	
8. Seram Bagian Barat (SBB)	552.682	-	436.322	
9. Seram Bagian Timur (SBT)	2.196.424	-	-	
10. Kota Ambon	477.016	-	77.846	
11. Kota Tual	90.943	1.519.204	42.962	
MALUKU				
	2009*	17.217.529	4.810.427	16.925.774
	2008	15.502.903	3.835.197	15.029.703
	2007	885.680	58.970	873.476
	2006	864.079	57.536	853.516
	2005	15.567.542	960.300	15.062.111

Catatan: *) Angka Sementara; Sumber: BPS Provinsi Maluku 2010.

Tabel 2. Jumlah Ternak di Provinsi Maluku, 2005–2009 (ekor).

Jenis Ternak	T a h u n				
	2005	2006	2007	2008	2009
Sapi Perah	-	-	-	-	-
Sapi Potong	66.578	67.948	70.402	74.654	79.162
Kerbau	22.604	23.164	24.547	26.012	27.565
Kambing	146.193	149.405	160.834	173.139	212.554
Domba	13.278	13.447	16.352	17.521	18.774
Babi	110.896	115.627	133.572	154.302	185.828
Kuda	8.852	8.852	9.729	10.599	11.541
Ayam Petelur	8.250	8.935	9.524	20.524	25.743
Ayam Buras	1.829.833	2.047.953	2.274.457	2.526.012	2.805.390
Ayam Pedaging	80.945	111.360	112.474	119.886	127.787
Itik	232.440	235.927	277.962	303.312	341.577

Sumber: BPS Provinsi Maluku 2010.

Dominasi Ternak pada Gugus Pulau

Jenis dan populasi ternak yang ada dan dominan pada gugus pulau berbeda-beda menurut keadaan spesifik gugus-gugus pulau tersebut. Berikut adalah dominasi ternak pada beberapa pulau dan gugus pulau di Maluku.

Gugus Pulau: Buru, Seram, Ambon, Kepulauan Lease, Geser, Gorom, Monowako, Banda, Teon, Nila dan Serua

Pulau Buru

Jenis, jumlah populasi dan produksi ternak di Pulau Buru dapat dilihat pada Tabel 3 berikut (Dinas Peternakan Kabupaten Buru 2010).

Tabel 3. Jenis Ternak, Perkembangan Populasi dan Jumlah Produksi Kabupaten Buru Tahun 2007-2008.

No	Jenis Ternak	Jumlah Populasi (Ekor)		Jumlah Produksi (Ton)			
		2007	2008	Daging		Telur	
				2007	2008	2007	2008
1	Sapi	46,590	41,349	383.01	346.81	-	-
2	Kerbau	3,358	3,699	6.47	20.77	-	-
3	Kuda	413	497	-	-	-	-
4	Babi	8,412	1,276	4.41	1.64	-	-
5	Kambing	42,056	26,950	56.14	43.67	-	-
6	Itik	196,324	195,007	88.88	92.49	290.69	79.9
7	Ayam Buras	1,415,644	1,346,347	1,293.28	1,194.01	308.59	297.6
	Jumlah	1,712,797	1,615,125	1,832.19	1,699.39	599.28	377.50

Sumber: Dinas Peternakan Kabupaten Buru 2010.

Pulau Seram

Usaha peternakan yang ada saat ini umumnya merupakan peternakan rakyat dan masih bersifat tradisional. Populasi ternak yang banyak adalah kelompok unggas, sapi, babi dan kambing. Dari rata-rata produksi yang dimiliki, ketersediaan lahan sangatlah luas, maka perlu adanya suatu upaya pengelolaan secara optimal dan profesional guna terciptanya peningkatan pendapatan (Badan Pengelola Kapet Seram 2010).

Kota Ambon

Populasi ternak yang diusahakan tahun 2008, terdiri dari ternak besar: Sapi 640 ekor, Kerbau 61 ekor, untuk ternak kecil yaitu Kambing 853 ekor, Babi 1.883 ekor. Untuk jenis unggas yaitu Itik 890 ekor dan Ayam 66.848 ekor. Bila dibandingkan dengan makin tingginya kebutuhan konsumsi masyarakat terhadap daging setiap tahun, maka sangat terbuka peluang investasi untuk mengembangkan sektor peternakan di Kota Ambon.

Investasi subsektor peternakan dapat dilakukan pada bagian hulu dan bagian hilir, untuk ternak besar dapat dikembangkan usaha peternakan dan usaha penggemukan sedangkan pada bagian hilir dapat dikembangkan usaha pengolahan dalam bentuk industri pengolahan daging abon atau dendeng. Untuk ternak unggas, usaha yang dapat dikembangkan adalah usaha peternakan perdagangan pakan ternak pada bagian hulu dan pada bagian hilir adalah usaha rumah makan/restoran (Dinas Peternakan Kota Ambon 2010).

Tabel 4. Populasi Ternak Pulau Seram Diperinci Per Kecamatan.

Kecamatan	Kuda	Sapi	Kerbau	Babi	Kambing	Ayam Buras
Amahai	10	1,433	-	2,263	803	18,297
Kota Masohi	8	158	-	-	201	550
Tehoru	-	294	-	525	1,794	3,305
TNS	19	740	-	883	153	20,387
Seram Utara	-	9,963	-	475	3,393	17,499
Seram Barat	-	878	-	87	145	12,690
Waesala	-	87	-	-	1,643	30,297
Kairatu	-	4,131	-	770	664	18,503
Taniwel	-	1,918	-	786	274	14,096
Seram Timur	-	252	-	-	4,405	88,367
PP.Gorom	-	-	-	-	-	-
Werinama	-	842	-	-	3,150	33,814
Bula	-	1,812	-	-	828	24,607
Jumlah	37	22,508	-	5,789	17,453	282,412

Sumber: BPS Provinsi Maluku 2004 & 2006.

Gugus Pulau Tanimbar dan Pulau-pulau Terselatan

Jenis-jenis ternak yang diusahakan antara lain adalah sapi, kerbau, kambing, domba, babi dan kuda, serta jenis-jenis unggas, dengan total populasi ternak mencapai 144.550 ekor. Jenis ternak yang paling potensial adalah kambing, babi, kerbau dan sapi, dan populasi ternak unggas mencapai 3.036.236 ekor ayam buras dan 167.903 ekor itik (Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat 2009).

Tabel 5. Potensi Ternak Gugus Pulau Tanimbar dan Pulau-pulau Terselatan

No	Jenis Ternak	Sentra Peternakan	Populasi	Luas Lahan (ha)
1	Kambing	Pulau Terselatan	25.000	14.960
2	Domba	Pulau Terselatan	5.000	14.960
3	Sapi	Pulau Tanimbar, Pulau Terselatan & Pulau Babar	10.000	21.375
4	Kerbau moa	Pulau Leti, Moa, Lakor & Pulau Terselatan	20.000	25.650
5	Ayam	Tanimbar Selatan & Pulau Terselatan	300.000	8.500
6	Itik	Tanimbar Selatan & Pulau Terselatan	10.000	8.500

Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat 2009.

Produksi Dan Konsumsi Hasil Ternak

Berikut ini adalah data tentang jumlah produksi hasil ternak dan jumlah yang dikonsumsi masyarakat di Provinsi Maluku beberapa tahun terakhir (BPS Nasional 2010).

Tabel 6. Produksi dan Konsumsi Daging dan Telur Per Tahun Provinsi Maluku, Tahun 2005–2008 (ton).

Komoditi	Tahun					Growth thn Terakhir (%)
	2005	2006	2007	2008	2009	
A. Produksi						
1. Daging						
Sapi	1,641.74	1,612.95	1,261.00	1,261.00	1,292.53	2.50
Kerbau	248.00	350.93	343.98	274.00	290.00	5.84
Kambing	710.09	1,323.00	47.33	840.00	873.60	4.00
Domba	67.58	63.66	4.86	89.00	96.00	7.87
Babi	1,751.10	1,820.70	2,160.67	2,764.00	2,874.56	4.00
Ayam						
Buras	2,029.34	1,972.56	291	341	341	0.00
Ayam						
Pedaging	66.91	73.41	106.75	102.00	106.08	4.00
Jumlah	6,514.76	7,417.22	4,215.60	5,671.00	5,873.77	4.03
2. Telur						
Ayam						
Buras	778.38	1,168.81	1,308.13	861.30	887.14	3.00
Ayam						
Petelur	53.46	63.61	68.89	213.07	221.59	4.00
Itik	836.78	1,276.10	1,295.24	834.98	868.38	4.00
Jumlah	1,668.62	2,508.51	2,672.26	1,909.35	1,977.11	3.67
B. Konsumsi						
Daging	6,633	5,182	5,447	6,018	-	10.5
Telur	1,669	1,948	2,068	2,331	-	12.7

Sumber: BPS 2010 (Direktorat Jenderal Peternakan).

KENDALA TEKNIS DAN SUMBERDAYA PETERNAK YANG DIHADAPI

Sebagaimana dihadapi oleh banyak peternak tradisional pada umumnya, petani peternak di Provinsi Maluku pada umumnya masih memelihara ternak secara tradisional. Ternak-ternak dilepas di padang baik pada siang maupun malam hari tanpa penjagaan intensif. Juga peternak yang melepaskan ternaknya secara bebas di lapangan di siang hari dan pada malam hari dimasukkan ke kandang atau ditambatkan di belakang rumah. Sebagian kecil peternak memelihara ternaknya secara semi intensif bahkan juga intensif. Usaha peternakan secara umum belum dijadikan sebagai sebuah usaha yang ditekuni intensif oleh masyarakat. Yang ada hanyalah peternakan-peternakan tradisional tanpa adanya suatu sistem tertentu.

Aspek Inovasi Teknologi

Salah satu kenyataan di tingkat peternak dan dibenarkan oleh penilaian Direktorat Jenderal Peternakan bahwa sampai saat ini peternak masih bersifat sebagai penerima teknologi, dan belum sebagai pengguna teknologi peternakan, misalnya teknologi: pakan, pembibitan, penanganan panen, pengolahan pascapanen, teknologi pengolahan kompos, pengobatan ternak, vaksinasi ternak (Hasnudi *et al.* 2004). Peternak baik secara individu maupun sebagai kelompok masih melaksanakan pendekatan pemeliharaan ternak secara tradisional atau cara

pendekatan pemeliharaan ternak sebagaimana yang diperoleh secara turun-temurun serta ketergantungan pada kemurahan alam. Kalaupun ada sentuhan teknologi hanya dilakukan segelintir peternak dan itupun alakadarnya.

Aspek Usaha

Kondisi peternak sebagian besar ditinjau dari aspek usaha, memperlihatkan perusahaan ternak masih dalam skala kecil dan bersifat sambilan, sulit memperoleh informasi, kurang sarana dan lokasi tersebar luas sehingga manajemen peternak tidak efisien, biaya tinggi, tidak terpolo dan kurang memiliki daya saing (Eaton *et al.* 2002). Bidang usaha yang digeluti peternak dikaitkan dengan sistem agribisnis umumnya bergerak pada kegiatan budidaya (*on-farm*) saja. Sementara kegiatan hulu dan hilir ditangani oleh pedagang dan segelintir perusahaan. Peternak kurang mampu menjalin kerjasama atau kemitraan usaha dengan peternak lain, koperasi atau dengan perusahaan.

Aspek Permodalan

Peternak sebagaimana cerminan dari usaha sambilan secara umum, lemah dalam permodalan, dan akses kepada lembaga keuangan juga kurang. Disisi lain sering kita lihat bahwa keberpihakan lembaga keuangan juga rendah terhadap usaha sambilan tersebut. Peternak tidak memiliki agunan untuk perolehan kredit sebagaimana yang dipersyaratkan serta dinilai usaha ternak beresiko tinggi oleh lembaga keuangan. Bagi pihak lembaga keuangan mengurus peternak-peternak kecil yang tersebar meluas dan kemungkinan kredit kecil-kecilan akan mengakibatkan kebutuhan tenaga pekerja, kerepotan dan biaya administrasi dan operasional lembaga keuangan menjadi tinggi.

Aspek Diversifikasi Produk

Hampir keseluruhan peternak tidak memiliki kemampuan untuk melakukan diversifikasi produk dari usaha ternak yang digelutinya, sehingga tidak memiliki nilai tambah. Peternak cenderung menjual ternak ke pasar jika kebutuhan mendesak untuk memperoleh uang tunai, sekalipun harga yang diajukan pembeli tidak sebagaimana kewajarannya.

Aspek Pemasaran

Peternak baik secara individu maupun secara kelompok belum mampu mempengaruhi pasar ternak, bahkan sangat tergantung terhadap peran pedagang pengumpul atau pedagang perantara. Keberadaan pasar hewan hanya terbatas pada lokasi-lokasi tertentu dan itupun dengan fasilitas yang sangat minim, menyebabkan cara penentuan harga dengan sistem taksiran. Peternak tidak memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang tinggi dan rantai pemasaran yang panjang serta fluktuasi harga yang tidak menentu. Akhir kesemua itu seringkali merugikan peternak sebagai produsen ternak.

Aspek Sumber Daya Manusia

Peternak umumnya tinggal di pedesaan dengan segala keterbatasannya terutama usianya rata-rata telah lanjut dan tingkat pendidikan relatif rendah. Sedangkan angkatan muda yang rata-rata pendidikan lebih tinggi, kurang menaruh minat menekuni usaha pemeliharaan ternak. Kondisi peternakan tersebut di atas sangatlah memprihatinkan karena kegiatan pembangunan dibidang peternakan yang dilaksanakan oleh pemerintah selama puluhan tahun dengan alokasi pembiayaan yang cukup besar masih belum membuahkan hasil optimal.

RENCANA DAN KEBIJAKAN STRATEGIS PENGEMBANGAN PETERNAKAN PULAU-PULAU KECIL DI PROVINSI MALUKU

Beranjak dari kenyataan di atas, berarti kita masih perlu mengembangkan inovasi-inovasi praktis dan relevan dalam konsep pembangunan peternakan ke depan di Pulau-pulau Kecil Provinsi Maluku. Konsep tersebut haruslah mampu memberikan sentuhan perbaikan atas penyebab masih munculnya kelemahan-kelemahan yang tercermin dari berbagai aspek di atas. Menarik untuk dikaji dan diterapkan dalam kondisi ini adalah konsep pembangunan peternakan melalui pengembangan kawasan agribisnis berbasis peternakan, yang diartikan sebagai suatu proses pembangunan dalam suatu besaran/satuan wilayah tertentu dengan menerapkan pendekatan kelompok dengan komoditas unggulan yang dikelola secara agribisnis berkelanjutan yang berakses ke industri peternakan hulu sampai hilir (Taufiq 2008).

Dengan konsep tersebut mengarahkan usaha ternak pada kondisi yang lebih berpeluang kepada peningkatan keuntungan dan daya saing, sebagai hasil dari kemudahan penyelenggaraan berbagai kegiatan yang berpengaruh penting terhadap usaha ternak dan berada pada satu lokasi yang terjangkau. Pada kondisi ini pemerintah berpeluang lebih mudah meningkatkan pelayanan teknis, penyediaan fasilitas secara efisien dan efektif, sehingga dapat menekan biaya transportasi, lebih menjamin terwujudnya keterkaitan agribisnis hulu-hilir, memudahkan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan serta terwujudnya pola kemitraan peternak dengan pengusaha. Para peternak akan lebih intensif dalam pemeliharaan ternak dan cepat menjadi mandiri dengan skala usaha ekonomis.

Konsep pembangunan peternakan melalui pengembangan kawasan agribisnis berbasis peternakan di Provinsi Maluku, perlu dibangun dengan memperhatikan kendala dasar wilayah kepulauan yaitu kebutuhan infrastruktur transportasi pokok antar gugus pulau. Proses pembangunan kawasan agribisnis peternakan akan terhambat bila tidak dibarengi pembangunan infrastruktur transportasi yang memadai. Pengembangan kawasan agribisnis peternakan juga lebih tepat disesuaikan dengan karakteristik spesifik gugus pulau dan potensi sumberdaya ternak yang tersedia. Berikut ini dijabarkan beberapa konsep rencana dan kebijakan strategis untuk pengembangan agribisnis usaha peternakan di kawasan Pulau-pulau Kecil Provinsi Maluku.

Konsep Pengembangan Kawasan Berbasis Potensi Ternak dan Sumberdaya Alam

Sesuai potensi ternak yang ada pada masing-masing pulau maka pengembangan agribisnis peternakan menurut gugus pulau adalah:

1. Pulau Buru dan Seram sesuai untuk pengembangan ternak besar seperti sapi, kambing dan babi, serta ternak unggas seperti ayam buras, pedaging, petelur dan itik. Pengembangan usaha agribisnis ternak ini sesuai dengan keadaan alam dan potensi sumberdaya yang tersedia yaitu baik potensi ternak, lahan/padang, hijauan maupun bahan baku makanan ternak.

Pemeliharaan usaha ternak dapat diarahkan kepada petani/peternak individu dengan skala usaha kecil/rumahtangga, kelompok peternak atau koperasi dengan skala sedang dan menengah, serta pengusaha berskala kecil, menengah dan besar. Dalam tujuan membangun kapasitas peternak lokal yang kuat, tahap awal pengembangan lebih diarahkan kepada individu peternak lokal (rumahtangga) skala kecil dan juga kelompok peternak kolektif dalam bentuk koperasi. Pada tahap lanjutan, pengembangan dapat diarahkan kepada pengusaha kecil, menengah dan besar secara komersil bersinergi dengan kelompok peternak individu rumahtangga dan kelompok peternak koperasi.

Pengembangan usaha pemeliharaan ternak harus dibarengi dengan pengembangan unit-unit kegiatan produksi pembibitan, produksi bahan pakan dan obat-obatan kebutuhan ternak, serta penggemukan. Karena itu perlu dibangun unit-unit produksi pembibitan, pengolahan makanan/pakan konsentrat, dan obat-obatan/vaksin serta penggemukan ternak. Pengembangan pada sisi ini sangat penting diarahkan juga pada pemanfaatan potensi sumberdaya dan bahan baku lokal seperti pembibitan dan pemuliaan ternak lokal, pengolahan dan prosesing bahan pakan dan obat-obatan alternatif lokal.

Dalam konsep hulu-hilir, perlu dibangun pusat-pusat pemasaran lokal ternak dan hasil ternak, seperti pasar bibit, pasar/pelelangan ternak hidup dan daging, pasar/pusat pengolahan makanan dari hasil ternak yang melibatkan pedagang kecil dan makanan.

2. Pulau Ambon dan kota Ibukota Kabupaten/Kota lainnya sesuai untuk pengembangan usaha ternak unggas: ayam buras, pedaging dan petelur. Juga pengembangan unit-unit usaha penggemukan ternak besar. Pengembangan usaha ternak perlu dibarengi pengembangan industri makanan ternak dan obat-obatan, industri pembibitan, dan industri pengolahan hasil ternak, unit-unit distribusi (jasa) bahan makanan ternak, hasil ternak dan obat-obatan.

3. Kepulauan Tanimbar dan Pulau-pulau Terselatan sesuai untuk pengembangan ternak kambing, domba, sapi, serta ternak unggas seperti ayam buras. Pengembangan usaha agribisnis ternak ini sesuai dengan keadaan alam dan potensi sumberdaya yang tersedia yaitu baik potensi ternak, lahan/padang, hijauan maupun bahan baku makanan ternak.

Sama seperti di Pulau Buru dan Seram, pemeliharaan usaha ternak diarahkan kepada peternak individu dengan skala usaha kecil/rumahtangga, kelompok peternak atau koperasi dengan skala sedang dan menengah, serta pengusaha berskala kecil, menengah dan besar. Tahap awal pengembangan diarahkan

kepada individu peternak lokal (rumah tangga) skala kecil dan juga kelompok peternak kolektif dalam bentuk koperasi dan pada tahap lanjutan, pengembangan diarahkan kepada pengusaha kecil, menengah dan besar secara komersial yang tetap bersinergi dengan kelompok peternak individu rumah tangga dan kelompok peternak koperasi.

Usaha pemeliharaan ternak perlu dibarengi dengan pengembangan unit-unit kegiatan produksi pembibitan, produksi bahan pakan dan obat-obatan kebutuhan ternak, serta penggemukan. Pengembangan juga diarahkan pada pemanfaatan potensi sumberdaya dan bahan baku lokal seperti pembibitan dan pemuliaan ternak lokal, pengolahan dan prosesing bahan pakan dan obat-obatan alternatif lokal.

Perlu dibangun pusat-pusat pemasaran lokal ternak dan hasil, seperti pasar bibit, pasar/pelelangan ternak hidup dan daging, pasar/pusat pengolahan makanan dari hasil ternak yang melibatkan pedagang kecil dan makanan.

Kebijakan Pengembangan Kawasan Agribisnis Peternakan

Dalam rangka mensinergikan antara rencana pengembangan agribisnis peternakan yang berpusat pada kawasan gugus pulau dan pengambilan kebijakan yang tepat, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang besar dalam menyukseskan pembangunan tersebut. Beberapa kebijakan dasar yang dibutuhkan untuk mendorong percepatan pencapaian pembangunan agribisnis peternakan tersebut di antaranya adalah:

1. Pembangunan infrastruktur transportasi yang memadai terutama transportasi lokal darat dan transportasi laut antarwilayah gugus pulau (Departemen Pekerjaan Umum 2005). Kondisi kepulauan dengan gugus pulau yang tersebar dan pusat-pusat pengembangan agribisnis peternakan kepulauan hanya dapat berkembang dengan baik dan cepat jika infrastruktur transportasi tersedia dan berfungsi dengan baik. Kebutuhan infrastruktur transportasi adalah mutlak dan terkait dengan keterbukaan peluang bagi pengembangan investasi baik di sektor agribisnis peternakan maupun di sektor lainnya. Peluang pertumbuhan yang cepat dari agribisnis peternakan juga sangat ditentukan oleh pengembangan investasi di sektor perdagangan, perhotelan dan restoran, keuangan, jasa, dan lain-lain.
2. Kebijakan kemudahan perijinan usaha dan bisnis UKM berbasis peternakan ekonomi.
3. Kebijakan kredit dan permodalan kepada UKM ternak dan hasil ternak.
4. Kebijakan pembentukan kelembagaan peternak secara formal.
5. Kebijakan kemitraan antara peternak dengan stakeholder lainnya.
6. Kebijakan penetapan pusat-pusat perdagangan dan pemasaran ternak secara lokal, antar wilayah dan antar region.

Pengembangan Aspek Teknis Usaha Peternakan dan Sumberdaya Peternak

Beberapa aspek penting mengenai perbaikan dan peningkatan mutu Sumber Daya Manusia/SDM peternak yang perlu ditangani secara baik terkait pengembangan agribisnis peternakan Pulau-pulau Kecil di Provinsi Maluku adalah:

1. Pembinaan untuk transformasi pola pikir (*mindset*) peternak tradisional yang perilakunya belum intensif pada usaha ternak. Petani peternak di Maluku masih berstatus pengelola multi usaha dan tidak spesifik pada salah satu jenis usaha. Perilaku ini kurang sejalan dengan jiwa dan *entrepreneurship* pelaku agribisnis peternakan.
2. Pembinaan teknis pemeliharaan ternak para peternak yang mengarah kepada intensifikasi dan bisnis, serta pelatihan dan penggunaan teknologi peternakan diantaranya teknologi pakan, pembibitan, penanganan panen, pengolahan pascapanen, teknologi pengolahan kompos, pengobatan ternak, dan vaksinasi ternak.
3. Pembinaan kemampuan manajemen usaha dan bisnis ternak secara komersil dan maju, akses kepada teknologi, informasi dan pasar secara terbuka.
4. Pembinaan pengolahan pascapanen hasil ternak yang lebih baik dan maju.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka pengembangan usaha ternak di Provinsi Maluku perlu dilakukan melalui konsep pengembangan kawasan agribisnis berbasis peternakan yang dikelola secara berkelanjutan dan berakses ke industri peternakan hulu sampai hilir. Konsep tersebut mengarahkan usaha ternak pada kondisi yang berpeluang pada peningkatan keuntungan dan daya saing.

Diperlukan peran Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan teknis, penyediaan fasilitas secara efisien efektif, sehingga dapat menekan biaya transportasi, lebih menjamin terwujudnya keterkaitan agribisnis hulu-hilir, memudahkan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan serta terwujudnya pola kemitraan peternak dengan pengusaha. Pengembangan kawasan agribisnis berbasis peternakan di Provinsi Maluku perlu dibangun dengan memperhatikan kendala dasar wilayah kepulauan yaitu kebutuhan infrastruktur transportasi pokok antar gugus pulau.

Pengembangan kawasan agribisnis peternakan menurut gugus pulau adalah: Pulau Buru dan Seram sesuai untuk pengembangan ternak besar seperti sapi, kambing dan babi, serta ternak unggas seperti ayam buras, pedaging, petelur dan itik. Pulau Ambon dan kota Ibukota Kabupaten/Kota lainnya sesuai untuk pengembangan usaha ternak unggas: ayam buras, pedaging dan petelur. Juga pengembangan unit-unit usaha penggemukan ternak besar. Kepulauan Tanimbar dan Pulau-pulau Terselatan sesuai untuk pengembangan ternak kambing, domba, sapi, serta ternak unggas seperti ayam buras.

Kebijakan dasar yang dibutuhkan untuk mendorong percepatan pencapaian pembangunan agribisnis peternakan tersebut di antaranya adalah 1) Pembangunan infrastruktur transportasi yang memadai terutama transportasi lokal darat dan transportasi laut antarwilayah gugus pulau; 2) Kebijakan kemudahan perijinan usaha dan bisnis UKM berbasis peternakan ekonomi; 3) Kebijakan kredit dan permodalan kepada UKM ternak dan hasil ternak; 4) Kebijakan pembentukan kelembagaan peternak secara formal; 5) Kebijakan kemitraan antara peternak dengan *stakeholder* lainnya; dan 6) Kebijakan penetapan pusat-pusat perdagangan dan pemasaran ternak secara lokal, antar wilayah dan antar region.

Perbaikan terhadap mutu Sumberdaya Manusia/SDM peternak mencakup 1) Pembinaan untuk transformasi pola pikir (*mainset*) peternak dari tradisional ke modern; 2) Pembinaan teknis pemeliharaan ternak para peternak yang mengarah kepada intensifikasi dan bisnis, serta pelatihan dan penggunaan teknologi peternakan di antaranya teknologi pakan, pembibitan, penanganan panen, pengolahan pascapanen, teknologi pengolahan kompos, pengobatan ternak, dan vaksinasi ternak; 3) Pembinaan kemampuan manajemen usaha dan bisnis ternak secara komersil dan maju, akses kepada teknologi, informasi dan pasar secara terbuka; dan 4) Pembinaan pengolahan pascapanen hasil ternak yang lebih baik dan maju.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. 2009a. Data dan Informasi dalam Rangka Penyusunan RPJMN 2010–2014 Berdimensi Ruang dan Wilayah, Wilayah Maluku. Jakarta: Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
- Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. 2009b. Peraturan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010. Pengembangan Wilayah Kepulauan Maluku Tahun 2010. Jakarta: Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
- Budhiman S. 2005. Pemanfaatan Data Resolusi Tinggi untuk Penyusunan Tata Ruang Pulau-pulau Kecil (Studi Kasus: Pulau Belakang Padang, Provinsi Kepulauan Riau. Jakarta: Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional – LAPAN, Pusat Pengembangan Pemanfaatan dan Teknologi Penginderaan Jauh.
- Dutton IM. 1998. Sambutan Chief of Party Proyek Pesisir. Jakarta: Prosiding Seminar dan Lokakarya Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia. Kerjasama Depdagri, Direktorat Pengelolaan Sumberdaya Lahan dan Kawasan, TPSA, BPPT dan Coastal Resources Management Project, USAID.
- Departemen Pekerjaan Umum. 2005. Rencana Tata Ruang (RTR) Kepulauan Maluku. Jakarta: Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional, Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum.
- Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Maluku. 2010. Geografis Maluku. Ambon: Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.
- BPS Provinsi Maluku. 2010. Statistik Sektorial. Ambon: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku.
- . 2006. Maluku Tengah Dalam Angka. Ambon: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku.
- . 2004. Maluku Tengah Dalam Angka. Ambon: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku.
- Badan Pengelola Kapet Seram. 2010. Potensi Peternakan. Ambon: Badan Pengelola Kapet Seram, Maluku – Indonesia.
- Dinas Peternakan Kabupaten Buru. 2010. Potensi Peternakan. Buru: Dinas Peternakan, Pemerintah Daerah Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.

- Dinas Peternakan Kota Ambon. 2010. Potensi Peternakan. Ambon: Dinas Peternakan, Pemerintah Kota Ambon, Provinsi Maluku.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat. 2009. Peluang Investasi dan Perdagangan. Saumlaki: Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- BPS Nasional. 2010. Produksi dan Konsumsi Telur dan Daging Provinsi Maluku. Jakarta: Badan Pusat Statistik Nasional.
- Hasnudi, Sembiring I, Umar S. 2004. Pokok-pokok Pemikiran Bidang Peternakan. Medan: Jurusan Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara.
- Eaton BC, Diane FE, Douglas WA. 2002. Microeconomics. Fifth Edition. Canada: Prentice Hall, Toronto.
- Taufiq MW. 2008. Implementasi Strategi Map untuk Pengembangan Bisnis Berkelanjutan. Bandung: Central Library Institute Technology Bandung.